



LKIP TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH
DPPKB KOTA BANDUNG



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	6
C. Tugas dan Fungsi	7
D. Isu Strategis.....	8
E. Landasan Hukum.....	10
F. Sistematika	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	12
1. Rencana Strategis.....	12
B. Indikator Kinerja Utama	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 4.....	20
D. Perencanaan Strategis Hasil Reviu	21
E. Rencana Strategis Hasil Reviu	21
F. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu	22
G. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	26
B. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	28
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	29
BAB IV PENUTUP.....	54
A. KESIMPULAN.....	54
B. REKOMENDASI	55



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunannya didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPKB Kota Bandung Tahun 2024 dan maksud tujuan disusunnya LKIP adalah :

1. Sebagai media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah;
2. Wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi wewenang dan mandat;
3. Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah; dan
4. Media informasi tentang sejauhmana penentuan prinsip-prinsip good governance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkutan.

Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan, namun demikian dengan adanya LKIP ini kami harapkan dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja khususnya pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung dan melalui penerapan perbaikan fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengukuran, data, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pencapaian kinerja, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan dan meminimalisir kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi pemerintah yang akuntabel dan yang lebih penting adalah meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dan lingkungan.



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung Tahun 2024 dapat memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 10 Januari 2025

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bandung

Dewi Kanasari, S.Sos., MA.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690604 199503 2 004



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Akhir tahun 2019 BKKBN mengemas dan memperkenalkan istilah Program KKBPK menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat menjadi Bangsa Kencana. Perubahan nama dari KKBPK menjadi Bangsa Kencana tersebut bertujuan untuk memudahkan penyebutan program, yang seringkali agak sulit untuk diucapkan. Peletakan kata Pembangunan Keluarga di depan menunjukkan bahwa DPPKB merupakan Dinas yang ingin memberikan manfaat kepada seluruh keluarga di Kota Bandung. Selain itu, DPPKB harus dapat mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk serta meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa tentram dan harapan masa depan yang lebih baik atau mandiri.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, DPPKB diberi mandate untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (ujuh) agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020-2024, yaitu untuk "Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, DPPKB berperan dalam 3 Program Prioritas (PP) yang masing-masing memiliki Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:

- 1) Program Pengendalian Penduduk, dengan Kegiatan Prioritas (KP); (1) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, dan (2) Pemetaan perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dengan Kegiatan Prioritas (KP); (1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, (2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB)/PLKB, (3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dan (4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan



Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB.

- 3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan Kegiatan Prioritas (KP); (1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan (2) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Sedangkan pada Program Nasional (PN) Revolusi Mental dalam system social untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta masyarakat dalam pembentukan karakter.

B. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang - undang ini secara tegas dijelaskan 3 (tiga) Sub urusan yang menjadi kewenangan kota, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakan dua urusan, yakni urusan Pengendalian Penduduk dan Urusan Keluarga Berencana lingkup Kota Bandung bermula dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1981 dan Perda Nomor 24 Tahun 1981. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Tingkat Kota Bandung, yang mengubah nama BPPKB Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung. Perubahan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi DPPKB kembali mengalami perubahan sesuai dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.



C. Tugas dan Fungsi

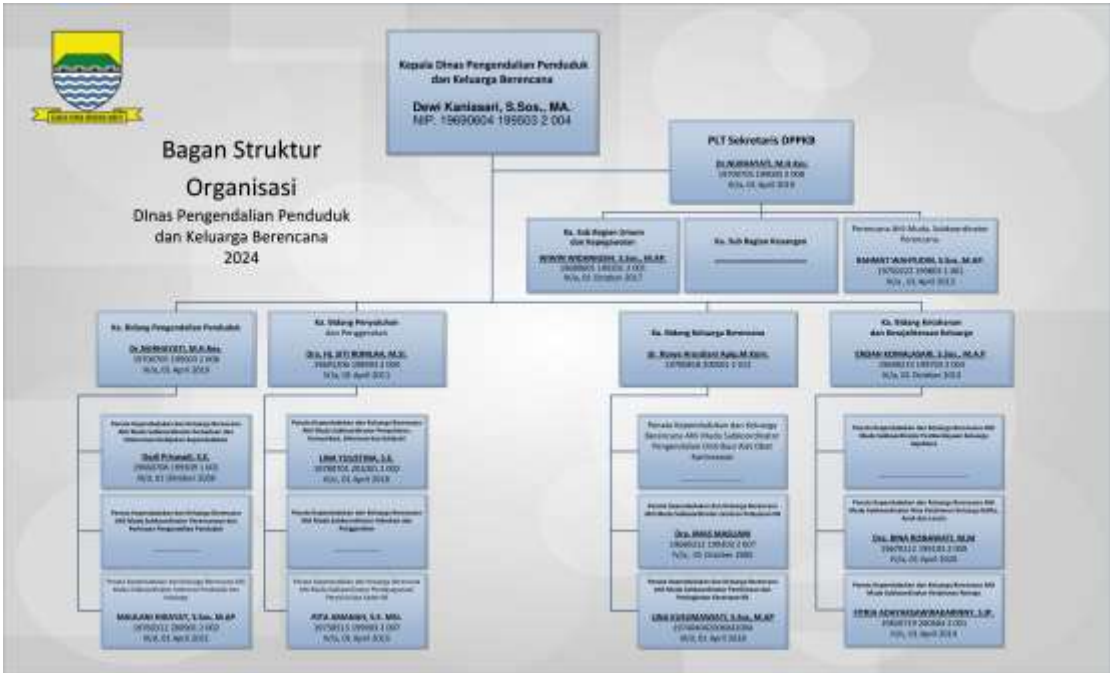
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



D. Isu Strategis

Berbagai isu strategis yang berkenbang saat ini dan perlu mendapat perhatian dalam perumusan arah kebijakan, strategi, serta kebijakan program/ kegiatan pada DPPKB Kota Bandung diantaranya adalah:

- 1) Isu strategis terkait pengendalian penduduk dan penguatan Tata Kelola Kependudukan;
 - a. Bonus demografi; Pembangunan Indonesia dalam periode tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yng diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran total/ total fertility rate (TFR). Angka kelahiran ini menjadi salah satu penentu struktur penduduk. Struktur penduduk Kota Bandung saat ini ditandai meningkatnya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi ini membuka peluang bagi Kota Bandung untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*) dengan salah satu prasyarat yang harus terpenuhi, yakni tersedianya SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Struktur penduduk seperti ini harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah dengan tetap menjaga TFR pada level tertentu, dan bonus demografi juga merupakan salah satu situasi yang harus dimanfaatkan lintas sektor pembangunan;



- b. Aging population; Perubahan struktur umur penduduk yang secara perlahan semakin menua merupakan salah satu dampak pengendalian TFR an perbaikan status Kesehatan. Jumlah dan proporsi lansia di Kota Bandung akan mengalami peningkatan yang lebih cepat dibandingkan dengan kota/ kabupaten yang telah mengalami aging sebelumnya. Saat ini pengelolaan penduduk kelompok lansia masih sangat mengandalkan pada keluarga dan komunitas. Keterbatasan kemampuan keluarga dalam mengelola kualitas hidup lansia akan menjadikan lansia semakin rentan, dan potensi permasalahan yang akan muncul akibat penduduk yang mulai menua (*aging population*) ini akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan apabila kelompok usia lansia tidak mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat;
- c. Pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga; Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas. Narasi ini, bahkan akan lebih komprehensif apabila dimulai dari gagasan perencanaan dari tahap pra berkeluarga (perencanaan kehidupan berkeluarga), merencanakan keinginan untuk memiliki anak termasuk jumlah anak yang dikehendaki, proses kehamilan yang merupakan fase yang juga penting dalam proses tumbuh kembang anak, 1.000 Hari Pertama Kehidupan (periode yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun), Pendidikan anak usia dini (pra sekolah) sampai dengan usia sekolah, remaja dengan berbagai pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang berkualitas menuju usia produktif/ bekerja serta perhatian terhadap kelanjutusiaan (seluruh tahapan kehidupan); dan
- d. Satu data kependudukan; Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu data Indonesia. Kebijakan Satu data Indonesia adalah kebijakan tata Kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Disatu sisi, Pendataan Keluarga (PK) yang menjadi tugas dan kewenangan DPPKB, harus dapat diintegrasikan dengan data sektor lain, seperti Sensus Penduduk (SP), serta Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), sehingga dapat terwujud satu data yang lengkap baik guna mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, maupun untuk mendukung operasionalisasi program/ kegiatan Bangsa Kencana di lini lapangan.

2) Isu Strategis terkait pemenuhan layanan dasar



- a. Informasi KB dan Kesehatan Reproduksi (Kespro), dan layanan KB untuk merencanakan waktu dan jarak kehamilan serta jumlah anak yang ideal.
 - b. Penurunan penggunaan kontrasepsi modern;
 - c. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - d. Kebutuhan ber-KB Pasangan usia Subur yang belum terlayani (unmet need);
 - e. Prevalensi Stunting masih tinggi: Stunting (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusi (SDM), juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa.
- 3) Isu Strategis terkait membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
- a. Rendahnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga;
 - b. Pernikahan Usia Anak: Kasus pernikahan usia anak masih banyak.

E. Landasan Hukum

LKIP DPPKB Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2020-2024;



9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala DPPKB Kota Bandung Nomor PN.03.03/2199.1-DPPKB/XII/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Strategis RPD Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2024-2026. Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola Pertanggung Jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung merupakan hasil



kesepakatan bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Visi :

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Sejahtera. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018 - 2023, yaitu:

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG
YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang.
- Unggul** : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik disetiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.



- Nyaman** : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan.
- Sejahtera** : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.
- Agamis** : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan.



Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2019-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk di Misi 1 (satu) Perubahan RPJMD 2021-2023 Kota Bandung. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2023 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis

Pencapaian misi 1 didukung oleh tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pencapaiannya dari indikator kinerja. Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung misi 1 dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan RPD

Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.

B. Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi 1 di atas dengan sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, maka dapat dilihat dari uraian sasaran strategis Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibawah ini :



1. Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga
2. Meningkatnya ketahanan keluarga
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN							
				2019	2020	2021	2023	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga	Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang			35.38	38.10	39.68	45.70	47.02	48.34
		Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga	Total Fertility Rate (TFR) Maksimum			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80.50	81.00	82.00	83	85.00	86.00	87.00

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah



Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung tahun 4 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2024

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga	Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang	%	Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang meliputi :	= Jumlah Kampung KB (Paripurna, Mandiri dan Berkembang) x 100% Jumlah Kampung KB	1. Keberadaan Pokja 2. Ketersediaan Sarana/Dukungan Sarana 3. Sumber Dana 4. Kepemilikan Poktan 5. Kepemilikan PKB/PLKB sebagai pendamping 6. Penggunaan data dalam perencanaan 7. Pelaksanaan Mekanisme Operasional 8. Keterlibatan lintas sektoral
2	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga	Total Fertility Rate (TFR) Maksimum	%	Angka Kelahiran Total (TFR) Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya	Angka Kelahiran Total (TFR) Nama Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Konsep Definisi Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Rumusan Kegunaan Sebagai	a. TFR sebesar 2,35 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun)



					<p>indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Keterangan Tambahan Variabel lain untuk menyusun indikator ini didapat dari Sensus Penduduk, SUPAS, Registrasi vital dan SDKI. Interpretasi a. TFR sebesar 2,35 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya b. TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi)</p>	<p>secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya b. TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi)</p>
3	<p>Meningkatnya ketahanan keluarga</p>	<p>Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)</p>	<p>%</p>	<p>Pengukuran Target berdasarkan kriteria Keluarga untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga</p>	<p>DIMENSIVARIABELKETENTR AMAN1Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut;2Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;3Setiap anak (usia 0-17 tahun) dalam keluarga memiliki akta lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;4Setiap anggota keluarga memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/ swasta);5Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat konflik keluarga : a.Tanpa tegur sapa; b.Pisahanjang antara suami dan istri; c. Pergi dari rumah/minggat; d.Kekerasan dalam rumah</p>	<p>Dihitung satu tahun sekali dari hasil pendataan</p>



					<p>tangga;6Keluarga mengalami cerai hidupSUB TOTALKEMANDIRIAN7Selama a 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan8Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan danldquo;makanan beragamdanrdquo; (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari;9Keluarga tinggal dalam rumah layak huni;10Keluarga memiliki tabungan/ simpanan (uang kontan, perhiasan, hewan ternak, hasil kebun, dll) yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 (tiga) bulan ke depan; hewan ternak, hasil kebun, dll) yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 (tiga) bulan ke depan;11Setiap anggota keluarga yang saat ini berusia sekolah (7-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah di SD/ sederajat sampai dengan SLTA/ sederajat);12Selama 1 (satu) bulan terakhir, terdapat anggota keluarga yang sakit (empat hari berturut- turut) sehingga meninggalkan aktifitas, atau ada anggota keluarga yang disabilitas;13Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga mengakses informasi dari media online (internet);</p>	
4	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai pada unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk	Keterangan : Jumlah Responden sebanyak : 265 orang Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut: (NRR U1 x 0,11) + (NRR U2 x 0,11) + (NRR U3 x 0,11) + (NRR U4 x 0,11) + (NRR U5 x 0,11) + (NRR U6 x 0,11) + (NRR U7 x 0,11) + (NRR U8 x 0,11) + (NRR U9 x 0,11) = 3.40 Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan	Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling



				setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11	hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Nilai IKM setelah dikonversi = 85.09 b. Mutu Pelayanan = B c. Kinerja unit pelayanan adalah Baik	rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. a. Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur pelayanan sebagai berikut : U3, U5, U8 b. Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur pelayanan sebagai berikut : U9, U4
--	--	--	--	--	---	---

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Dinas Pengendalian



Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kota Bandung
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengendalian penduduk	Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang	45.70
2	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga	Total Fertility Rate (TFR) Maksimum	2.00
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85.00

D. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 4, sebagai berikut :

E. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada



seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil revidi selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada

Berdasarkan hasil revidi dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 4 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Revidi
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya pengendalian penduduk	Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang	%	35.38	38.10	39.68	45.70	47.02	48.34
		Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga	Total Fertility Rate (TFR) Maksimum	%	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	81.00	82.00	83	85.00	86.00	87.00

F. Indikator Kinerja Utama Hasil Revidi

Bersamaan dengan revidi rencana strategis juga dilakukan revidi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana hasil revidi berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja
Hasil Reviu
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung
Tahun 2024

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Kampung Keluarga Berkualitas	Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang	%	Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang meliputi :	= Jumlah Kampung KB (Paripurna, Mandiri dan Berkembang) x 100% Jumlah Kampung KB		1. Keberadaan Pokja 2. Ketersediaan Sarana/Dukungan Sarana 3. Sumber Dana 4. Kepemilikan Poktan 5. Kepemilikan PKB/PLKB sebagai pendamping 6. Penggunaan data dalam perencanaan 7. Pelaksanaan Mekanisme Operasional 8. Keterlibatan lintas sektoral
2	Meningkatnya pengendalian penduduk	Total Fertility Rate (TFR) Maksimum	%	Angka Kelahiran Total (TFR) Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya	Angka Kelahiran Total (TFR) Nama Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Konsep Definisi Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Rumusan Kegunaan Sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan		a. TFR sebesar 2,35 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya b. TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi)



					<p>program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.</p> <p>Keterangan Tambahan Variabel lain untuk menyusun indikator ini didapat dari Sensus Penduduk, SUPAS, Registrasi vital dan SDKI.</p> <p>Interpretasi a. TFR sebesar 2,35 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa subur.</p> <p>b. TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi)</p>		
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai pada unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan	Keterangan : Jumlah Responden sebanyak : 265 orang Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai		Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus



				jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11	berikut: (NRR U1 x 0,11) + (NRR U2 x 0,11) + (NRR U3 x 0,11) + (NRR U4 x 0,11) + (NRR U5 x 0,11) + (NRR U6 x 0,11) + (NRR U7 x 0,11) + (NRR U8 x 0,11) + (NRR U9 x 0,11) = 3.40 Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Nilai IKM setelah dikonversi = 85.09 b. Mutu Pelayanan = B c. Kinerja unit pelayanan adalah Baik		tetap dipertahankan. a. Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur pelayanan sebagai berikut : U3, U5, U8 b. Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur pelayanan sebagai berikut : U9, U4
--	--	--	--	---	--	--	---

G. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala DPPKB Kota Bandung dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 4 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024	2025	2026
1	Meningkatnya pengendalian penduduk	Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang	%	45.70		
2	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga	Total Fertility Rate (TFR) Maksimum	%	2.00		



3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	85.00		
---	--	----------------------------------	--------	-------	--	--

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 4 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil



pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung
Tahun 4

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2024,



hasil revidi dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berdasarkan Keputusan Walikota Bandung telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor TL.03/023 -DPPKB/V/2024 tanggal 12 Mei 2024 dan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : TL.03/024 -DPPKB/V/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung juga melakukan revidi terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan revidi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang	%	45.70	78.15	171.01%
2	Total Fertility Rate (TFR) Maksimum	%	2.00	1.83	109.29%
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	85.00	89.42	105.20%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukan pada indikator Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang, dengan



capaian kinerja 171.01 %, pada indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 105.20 %.

Capaian kinerja yang mencapai target 109.29% ditunjukkan pada indikator Total Fertility Rate (TFR) Maksimum, dengan capaian kinerja 1.83 .

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024-2026.

Tahun 2024 adalah tahun ke 2024 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 3 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang	%	46.70	78.15	171.01%
2	Total Fertility Rate (TFR) Maksimum	%	2.00	1.83	109.29%
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	85.00	89.42	105.20%

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	100.00 %
2	Sesuai Target	00.00 %
3	Tidak Mencapai Target	00.00 %



Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	3	3	100.00	0	00.00	0	00.00
	Jumlah	3	3	100.00	0	00.00	0	00.00

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	3	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00%
2	Sesuai Target	1	00.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	00.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.



Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung tahun 2024-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%	RPD 2024 - 2026
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target
1	Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang	%	38.10	38.46	100.94	39.68	41,54	104.67	45.70	78.15	171.01	48.34

Sasaran Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang" adalah sebesar 78.15 dari target sebesar 45.70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 171.01 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang" tahun ini meningkat 4,67 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 166.21 %.

Tahun 2024 adalah tahun ke 1 renstra RPD, capaian kinerja indikator 1 "Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang" tahun ini adalah sebesar 171.01 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana maka capaian kinerjanya mencapai 161.67 %.

a. Upaya dan Solusi yang dilakukan :

1. Upaya yang dilakukan dengan optimalisasi sarana prasaran yang ada dengan melakukan promosi Keluarga Berencana dapat dilaksanakan dengan optimalisasi pemanfaatan KB Safari, yang dilaksanakan secara rutin melakukan sosialisasi secara



- langsung ke setiap wilayah Kecamatan dengan menggunakan Mobil Unit Penerangan (MUPEN).
2. Upaya yang dilakukan dengan optimalisasi kerjasama dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait sehingga Jumlah Kampung KB Aktif dapat terpenuhi,.
3. Dengan terberdayakannya para petugas penyuluh di Lini Lapangan yang berpengaruh besar atas tercapainya sasaran, sebagai ujung tombak atau penggerak program KB di tingkat RW sampai di tingkat Kecamatan.
- b. Faktor Pendukung :
- Faktor Pendukung dari Keberhasilan Sasaran I dari Indikator Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang, adanya pembinaan pada setiap Kelurahan dan Kecamatan oleh Para Mitra Kerja di Lapangan Penyuluh KB dan Kader PPKBD yang ada dikewilayahan yang membantu dalam pembinaan di Kampung KB.
- c. Faktor Penghambat :
- Dana yang terbatas dapat menghambat pelaksanaan program peningkatan kualifikasi, seperti pelatihan, pembangunan infrastruktur, atau penyediaan fasilitas pendukung, Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya program KB dan manfaat Kampung KB dapat menghambat partisipasi aktif. Sosialisasi yang kurang efektif juga menjadi faktor penghambat, Program Kampung KB melibatkan berbagai dinas terkait dan kewilayahan serta lembaga masyarakat disekitarnya. Koordinasi baik dapat meningkatkan efektivitas program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas.
- d. Solusi :
- Percepatan dalam proses Aktivasi di kampung KB dari tingkat kelurahan.

Sasaran 2
Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%	RPD 2024 - 2026
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target
1	Total Fertility Rate (TFR) Maksimum	%	2.00	1.83	109.29	2.00	1.79	115.61	2.00	1.83	109.29	2.00



Sasaran Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Total Fertility Rate (TFR) Maksimum" adalah sebesar sebesar 1.83 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dari target sebesar 2.00 (Maksimal) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 109.29%.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Total Fertility Rate (TFR) Maksimum" tahun ini meningkat 6.32 Point dari capaian tahun sebelumnya.

Tahun 2024 adalah tahun ke 1 renstra RPD, capaian kinerja indikator 1 "Total Fertility Rate (TFR) Maksimum" tahun ini adalah sebesar 109.29 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana maka capaian kinerjanya mencapai 109.29 %.

Perbandingan TFR Kota Bandung dengan Kota Lain :

Wilayah	TFR
Kota Bandung	1.83
Kota Bogor	1.89
Kota Bekasi	1.83

Kota Bandung memiliki TFR 1,83, lebih rendah dari: Kota-kota lainnya di Jabar seperti Kota Bogor (1,89). Secara signifikan di bawah rata-rata nasional (2,1).

Angka ini menandai bahwa perempuan di Bandung rata-rata hanya memiliki kurang dari 2 anak sepanjang masa reproduksi—selaras dengan tren di kota besar.

BPS mencatat seluruh kabupaten/kota di Jabar punya TFR di bawah 3, yang berarti laju fertilitas secara umum sudah terkendali.

Kota Bandung berada pada ujung rendah grafik fertilitas—berpotensi menghadapi population momentum atau aging lebih cepat jika tren ini berlanjut. Sementara daerah seperti Garut masih mempertahankan TFR tinggi, mencerminkan dinamika sosial-ekonomi yang berbeda. Kebijakan keluarga berencana (KB) yang aktif di Bandung tampaknya berhasil menekan fertilitas hingga di bawah tingkat penggantian populasi (replacement rate)

- a. Upaya dan Solusi yang dilakukan :
 - 1. Upaya yang dilakukan dengan optimalisasi pendataan keluarga yang terupdate setiap tahunnya, sehingga dapat menjadi landasan databasis pengukuran TFR di Kota Bandung yang lebih akurat.



2. Peningkatan Akses dan Pelayanan KB, Penyuluhan dan Edukasi Reproduksi, Kampung KB sebagai pusat edukasi, pelayanan KB, dan pemberdayaan masyarakat berbasis data keluarga, Advokasi dan Komitmen Pemerintah Daerah.
 3. Upaya yang dilakukan dengan optimalisasi kerjasama dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak OPD terkait sehingga perhitungan TFR di Kota Bandung dapat terpenuhi,.
 4. Dengan terberdayakannya para petugas penyuluh di Lini Lapangan yang berpengaruh besar atas tercapainya sasaran, sebagai ujung tombak atau penggerak program KB di tingkat RW sampai di tingkat Kecamatan.
- b. Faktor Pendukung : Faktor Pendukung dari Keberhasilan Sasaran I dari Indikator Total Fertility Rate (TFR) Maksimum, Faktor pendukung dalam pencapaian perhitungan TFR di Kota Bandung, BKKBN sebagai wadah atau leading sector utama dalam perhitungan hasil TFR Kota Bandung.
- c. Faktor Penghambat
- Faktor Penghambat DPPKB Kota Bandung belum memiliki Aplikasi untuk perhitungan jumlah TFR di Kota Bandung dan Belum tersedianya Data ASFR Interval Rentang Usia berdasarkan pemilahan 7 kualifikasi usia.
- d. Solusi
- Adanya kerjasama dalam tiap OPD terkait sehingga perhitungan TFR, sehingga perhitungan TFR di Kota Bandung bisa dilakukan perhitungan secara mandiri.



Sasaran 3

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2023		%	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	81.00	82.00	110.00	82.00	85.25	103.93	83.00	89,36	107,66	85.00	89.42	105.20

Sasaran Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat" adalah sebesar 89.42 dari target sebesar 85.00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 5 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 105.20 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini meningkat 0,06 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 89.36

Tahun 2024 adalah tahun ke 1 renstra RPD, capaian kinerja indikator 1 "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini adalah sebesar 105.20 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana maka capaian kinerjanya mencapai 103.98.

Adapun faktor pendukung tercapainya sasaran kinerja Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Adanya para petugas dilapangan yang membantu dalam pelaksanaan penyebaran kuisisioner melalui media elektronik berupa Google Form, agar masyarakat bisa lebih mudah mengisi kuisisioner Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024



DATA PENDUKUNG :

Screenshoot hasil pelaporan SKM pada Tahun 2024 melalui Aplikasi skm.bandung.go.id



D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.10
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
A. Misi 1					
1	Meningkatnya pengendalian penduduk	1	101.00%	99.88%	0.12%
2	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga	1	100.00%	98.16%	1.84%
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1	94.71%	92.33%	7.67%

Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja ke sebelas indikator Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung sebesar Rp. 47,913,364,316.00,- dari total anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung sebesar Rp. 49,530,812,771.00,-. Berdasarkan data, tahun anggaran 2024 pada program kegiatan utama DPPKB yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja ketiga



indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp. 49,530,812,771.00,- yang diserap sebesar Rp. 47,913,364,316.00,- LKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2024 terdapat efisiensi sebesar 3.27% yaitu sebesar Rp. 1,617,448,455.00,- telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran.

E. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024 melaksanakan 67 Sub kegiatan yang tercakup dalam 15 Kegiatan dan 4 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator program yaitu Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran realisasi 100 capaian 100 % dan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah capaian 83.05 dengan capaian realisasi 100 %, dengan anggaran sebesar 3,794,591,665.00 yang diserap sebesar 12,736,060,678.00 capaian realisasi anggaran 92.33%.

Faktor Pendukung :

- Adanya Alokasi Anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan operasional Kantor
- Tujuan, Sasaran, Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Faktor Penghambat :

- Belum terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia sesuai ANJAB ABK
- Belum optimalnya sarana dan prasarana

2. Program Pengendalian Penduduk dengan indikator Rumah Dataku Aktif dari target 25.16 capaian 83.44 realisasi sebesar 331.64% dan Sekolah Siaga Kependudukan Aktif dari target 46.66 dengan capaian 46.66 realisasi sebesar 100% dengan anggaran sebesar 1,357,116,340.00 yang di serap sebesar 1,345,287,100.00 capaian realisasi anggaran 99.13%.

Faktor Pendukung :

- Adanya Aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN dan Website Rumah Data Kependudukan yang dapat menyediakan data-data yang dibutuhkan terkait pengambilan kebijakan di tingkat kewilayahan;
- Adanya tenaga Penggerak Bangsa Kencana Kelurahan (PBKK) yang dapat membantu Kader Rumah Data Kependudukan (RDK) di Kelurahan dalam mengakses penggunaan Aplikasi.
- Adanya Tambahan Anggaran di perubahan dari Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK_) ke Rumah Data Kependudukan (RDK)

Faktor Penghambat :

- Kurangnya sarana dan prasarana di kewilayahan yg dapat mendukung terbentuknya RDK aktif;
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator Angka Pemakaian Kontrasepsi/Mcpr dari target 68.00 capaian 68.19 realisasi sebesar 100.26% dan Cakupan Kebutuhan KB yang Belum Terpenuhi (Unmeet Need) (Nilai Pembalik) dengan target 12.15 capaian 10.32 realisasi 116.28%, dengan anggaran sebesar 17,375,480,772.00 yang diserap sebesar 17,282,959,122.00 capaian realisasi anggaran 99.47%.

Faktor Pendukung :

- Adanya aplikasi sistem informasi keluarga yang bersifat online sehingga jika seluruh faskes tepat waktu mengisi bisa dengan cepat mendapatkan laporan hasil pelayanannya.
- Adanya tenaga PBKK yang membantu faskes untuk pencatatan pelaporan pelayanan KB.
- Adanya anggaran DAK BOKB untuk operasional pelayanan KB MKJP.

Faktor Penghambat :

- Belum seluruh fasilitas kesehatan pemberi layanan KB teregister dalam sistem informasi keluarga BKKBN (SIGA) yang menjadi sumber utama data hasil pelayanan KB.
- Terlalu banyaknya aplikasi yang harus diisi oleh faskes, selain dari aplikasi SIGA, ada juga aplikasi dari kemenkes, aplikasi BPJS, juga

aplikasi internal faskes, sehingga faskes harus menginputkan hal yang sama ke dalam beberapa aplikasi tersebut.

- Mobilitas SDM di faskes sehingga petugas yang sudah terlatih pencatatan pelaporan hasil pelayanan KB, diganti oleh petugas baru, sehingga membutuhkan kembali pelatihan.

4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator Persentase Sasaran Kelompok Kegiatan (POKTAN) yang aktif dari target 92.83 capaian 92.83 realisasi sebesar 100% dan Presentase Akseptor dan Keluarga Akseptor yang berwirausaha dari target 35.84 capaian 35.84 realiasi 100%, dengan anggaran sebesar 17,003,623,994.00 yang diserap sebesar 16,549,057,416.00 capaian realisasi anggaran 97.33%.

Faktor Pendorong :

- Adanya Kelompok Kegiatan (Poktan) yang Aktif
- Adanya Kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Kegiatan (Poktan)

Faktor Penghambat :

- Pembinaan Poktan yang belum optimal karna terbatasnya anggaran yang ada

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 4 (tiga) indikator program sebagaimana tercantum dalam Renstra RPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung Periode Tahun 2024- 2026 dengan target yang sudah ditetapkan., Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan Tiga tahunan (Renstra) RPD dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2024 dari 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung terdapat 2 (dua) indikator yang realisasinya melampaui target. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Perubahan DPPKB Tahun Anggaran 2024.

Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan di dalam pencapaian kinerja organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung sehingga masih ada satu indikator yang tidak mencapai

target. Faktor utama penyebab dari kegagalan tersebut adalah terjadinya beberapa regulasi yang berubah secara mendasar karena kebijakan dari Pemerintah Pusat sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja, karena Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah juga harus mengikuti apa yang diamanatkan oleh perubahan regulasi dimaksud. Berikut table Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung :

G. Prestasi Kinerja/ Inovasi yang dicapai

- 1. Juara 1 Kompetensi Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) Tingkat Nasional Tahu 2024 Kategori Kader DASHAT

Gambar 3.1



- 2. Apresiasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus SUBBIDANG KB Bagi Pemda Kategori Pagu Besar Tahun 2024.

Gambar 3.2



3. Penghargaan Kabupaten/Kota dengan Kinerja Terbaik dalam Penanganan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2024

Gambar 3.3



H. Capaian Anggaran dan Kinerja Program dan Kegiatan DPPKB Tahun Anggaran 2024

Berikut adalah capaian realisasi anggaran dan kinerja program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung tahun anggaran 2024, sebagai berikut :

Tabel. 3.11 Analisis Realisasi Capaian Program Kegiatan Anggaran dan Kinerja Tahun 2024

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	49,530,812,771.00	47,913,364,316.00	96.73%			
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,794,591,665.00	12,736,060,678.00	92.33%	Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	85.00%	89.42%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	368,381,524.00	361,384,555.00	98.10%	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	82,434,224.00	82,410,446.00	99.97%	Jumlah dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	255,151,810.00	253,646,969.00	99.41%	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,795,490.00	25,327,140.00	82.24%	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,421,315,115.00	7,766,649,920.00	92.23%	Jumlah laporan administrasi keuangan	2 Laporan	2 Laporan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,413,456,095.00	7,758,790,900.00	92.22%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang	38 Orang

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,859,020.00	7,859,020.00	100.00%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50,250,000.00		0.00%	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	50,250,000.00		0.00%	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	348,755,800.00	333,503,220.00	95.63%	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhi	12 Laporan	12 Laporan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	155,155,800.00	149,760,000.00	96.52%	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terealisasi	1 Paket	1 Paket
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	193,600,000.00	183,743,220.00	94.91%		84 Orang	84 Orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,022,208,072.00	908,138,160.00	88.84%	Jumlah Laporan Administrasi Umum	12 Laporan	12 Laporan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22,919,315.00	20,627,161.00	90.00%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196,586,868.00	185,748,950.00	94.49%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	68,094,525.00	64,350,064.00	94.50%	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	273,636,000.00	273,525,000.00	99.96%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	138,050,000.00	133,682,500.00	96.84%	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40,604,364.00	40,604,364.00	100.00%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	12 Dokumen	12 Dokumen

				PerundangUndangan yang Disediakan		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282,317,000.00	189,600,121.00	67.16%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190,033,000.00	185,945,744.00	97.85%	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	12 Laporan	12 Laporan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190,033,000.00	185,945,744.00	97.85%	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,796,900,154.00	1,655,788,907.00	92.15%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,700,000.00	6,700,000.00	100.00%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211,372,800.00	141,663,831.00	67.02%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,578,827,354.00	1,507,425,076.00	95.48%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,596,748,000.00	1,524,650,172.00	95.48%	Jumlah Laporan Pemelihaan Barang Milih Daerah	1 Laporan	1 Laporan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	882,521,000.00	849,034,051.00	96.21%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	405,780,000.00	374,086,860.00	92.19%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,400,000.00	16,362,400.00	99.77%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	218,611,000.00	213,847,605.00	97.82%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73,436,000.00	71,319,256.00	97.12%	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1,357,116,340.00	1,345,287,100.00	99.13%	Rumah Dataku Aktif	25.16%	83.44%
				Sekolah Siaga Kependudukan Aktif	46.66%	46.66%
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	462,587,800.00	461,566,100.00	99.78%	Persentase Kerjasama dengan Sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kependudukan meningkat	100.00%	100.00%
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	397,187,800.00	396,166,100.00	99.74%	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	65,400,000.00	65,400,000.00	100.00%	Jumlah Sekolah yang diberikan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	35 Sekolah	35 Sekolah
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	894,528,540.00	883,721,000.00	98.79%	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data (parameter dan penduduk) untuk perencanaan dan program pembangunan, Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	96,844,000.00	96,844,000.00	100.00%	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 Laporan	4 Laporan

Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	282,600,000.00	282,600,000.00	100.00%	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	2 Laporan
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	60,266,340.00	54,294,000.00	90.09%	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	454,818,200.00	449,983,000.00	98.94%	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	38 Unit	38 Unit
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	17,375,480,772.00	17,282,959,122.00	99.47%	Angka Pemakaian Kontrasepsi/Mcpr	68.00%	68.18%
				Cakupan Kebutuhan KB yang Belum Terpenuhi (Unmeet Need) (Nilai Pembalik)	12.15%	10.32%
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1,686,265,397.00	1,656,021,294.00	98.21%	Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya lokal terlaksana dengan baik	30 Kecamatan	30 Kecamatan
Pengendalian Program KKBPK	60,000,250.00	58,090,472.00	96.82%	Jumlah Stakeholder dan mitra kerja yang di Advokasi Program Bangga Kencana	1 Laporan	1 Laporan
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	247,733,660.00	237,352,000.00	95.81%	Jumlah Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya lokal	1 Laporan	1 Laporan

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	450,000,000.00	443,658,000.00	98.59%	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	4 Laporan	4 Laporan
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	203,250,000.00	199,719,070.00	98.26%	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	4 Dokumen
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	394,917,487.00	387,211,752.00	98.05%	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	250,280,000.00	250,000,000.00	99.89%	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	18 Kelompok	18 Kelompok
Pengendalian Program KKBPK	80,084,000.00	79,990,000.00	99.88%	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	1 Laporan
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	6,910,810,000.00	6,905,897,708.00	99.93%	Rasio Penyuluh KB dan Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD setiap kelurahan)	100%	100%
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	453,000,000.00	453,000,000.00	100.00%	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	453 Orang	453 Orang

Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	6,457,810,000.00	6,452,897,708.00	99.92%	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	12 Laporan
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3,741,199,500.00	3,689,927,370.00	98.63%	Pelaksanaan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor dan Pembinaan di Kampung Meningkatkan	30 Kecamatan	30 Kecamatan
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	268,440,900.00	252,690,000.00	94.13%	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Laporan	1 Laporan
Pembinaan Terpadu Kampung KB	2,771,449,500.00	2,762,434,650.00	99.67%	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	4 Laporan	4 Laporan
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	701,309,100.00	674,802,720.00	96.22%	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Laporan	4 Laporan
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	5,037,205,875.00	5,031,112,750.00	99.88%	Jumlah Fasyankes yang mendapatkan Distribusi, Alat, Obat dan Kontrasepsi	108 Fasyankes	108 Fasyankes

Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	44,999,000.00	41,452,000.00	92.12%	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10 Orang	10 Orang
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	138,400,000.00	138,400,000.00	100.00%	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	4 Laporan
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4,500,805,000.00	4,500,671,000.00	100.00%	Jumlah Laporan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4 Laporan	4 Laporan
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	36,462,000.00	36,462,000.00	100.00%	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	4 Laporan	4 Laporan
Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	89,960,000.00	89,960,000.00	100.00%	Jumlah Laporan Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	2 Laporan	2 Laporan
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	88,553,625.00	86,231,750	97.38%	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	4 Laporan

Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	79,952,250.00	79,862,000	99.89%	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	4 Laporan	4 Laporan
Peningkatan Kesertaan KB Pria	32,712,000.00	32,712,000	100.00%	Jumlah Laporan Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	4 Laporan	4 Laporan
Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	25,362,000.00	25,362,000	100.00%	Jumlah laporan orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	4 Laporan	4 Laporan
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	17,003,623,994.00	16,549,057,416.00	97.33%	Persentase Sasaran Kelompok Kegiatan (POKTAN) yang aktif	92.83%	92.83%
				Presentase Akseptor dan Keluarga Akseptor yang berwirausaha	35.84%	35.84%
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	12,242,612,869.00	12,013,430,291.00	98.13%	Jumlah pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah	30 Kecamatan	30 Kecamatan
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	5,755,050,000.00	5,530,300,000.00	96.09%	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	4 Laporan	4 Laporan

Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	6,213,900,000.00	6,213,900,000.00	100.00%	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	4 Laporan	4 Laporan
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	273,662,869.00	269,230,291.00	98.38%	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	1 Laporan
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4,761,011,125.00	4,535,627,125.00	95.27%	Kegiatan Promosi, Sosialisasi dan Edukasi Lingkup Kelompok Kegiatan Ketahanan Remaja, Balita, Anak dan Lansia Terlaksana dengan baik	30 Kecamatan	30 Kecamatan
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	2,796,193,500.00	2,793,118,500.00	99.89%	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300,150,000.00	290,966,000.00	96.94%	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	25 Unit	25 Unit
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1,427,618,000.00	1,214,718,000.00	85.09%	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	9360 Orang	9360 Orang
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	237,049,625.00	236,824,625.00	99.91%	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	20 Orang	20 Orang



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 4 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2024 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 171.01 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0.0 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 105.20 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah melampaui target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Daerah, DAK non Fisik dan Fisik Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 49,530,812,771.00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 47,913,364,316.00



dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung kondisi anggaran Silpa Rp. 1,617,448,455.00

Renstra RPD Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung 2024-2026 menetapkan sebanyak 3 (Sasaran) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahun 2024.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKIP yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung, antara lain :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKIP;
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA).

Bandung, 10 Januari 2025

Kepala DPPKB Kota Bandung

Dewi Kanasari, S.Sos., MA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690604 199503 2 004